

DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) DESA DI DESA JOHUNUT, KECAMATAN PARANGGUPITO, KABUPATEN WONOGIRI

Hasna Latifah¹, Agung Wibowo², Widiyanto³

¹ Universitas Sebelas Maret
hasnalatifah028@student.uns.ac.id

² Universitas Sebelas Maret
agungbersahaja@gmail.com

³ Universitas Sebelas Maret
widiyanto@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah utama yang harus diperhatikan dan segera diminimalisir. Upaya penganggulangan kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberdayakan masyarakat pedesaan. Strategi dan program penanggulangan kemiskinan perlu pendekatan yang terpadu, implementasinya dilakukan secara bertahap, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan semua pihak. Partisipasi masyarakat menjadi poin penting dalam keberhasilan program karena sangat ditentukan tingkat partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri karena merupakan salah satu desa pelaksana program SDGs Desa dengan kriteria daerah rawan kekeringan. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Validitas data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SDGs Desa yang terlaksana di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri yaitu bantuan RTLH dan bantuan benih dengan implementasi dari tahap sosialisasi, perekrutan hingga kegiatan pelaksanaan oleh masyarakat Desa Johunut berjalan baik. Implikasi yang diperoleh masyarakat dari pelaksanaan SDGs Desa yaitu peningkatan kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin.

Kata Kunci : Implementasi, Masyarakat, SDGs Desa

ABSTRACT

In Indonesia, poverty is still a major problem that must be considered and immediately minimized. In poverty alleviation efforts, the government has made various efforts to empower rural communities. Poverty reduction strategies and programs need an integrated approach, the implementation is carried out in stages, planned, sustainable, and requires the involvement of all parties. Community participation is an important point in the success of the program because the level of participation of the village community is very much determined. The research method used in this study is a qualitative method, using a descriptive approach. The research was determined purposively, namely in Johunut Village, Paranggupito District, Wonogiri Regency because it is one of the implementing villages for the Village SDGs program with criteria for drought-prone areas. Informants in this study were selected using purposive and snowball techniques. Data collection techniques are: observation, interviews, and documentation. The data used include primary data and secondary data. Analysis of the data using the interactive analysis model of Miles and Huberman. Data validity uses source triangulation, namely by comparing data from various informants. The results showed that the Village SDGs program implemented in Johunut Village, Paranggupito District, Wonogiri Regency, namely RTLH assistance

and seed assistance with implementation from the socialization stage, recruitment to implementation activities by the Johunut Village community went well. The implications obtained by the community from the implementation of the Village SDGs are improving the socio-economic conditions of poor households.

Keywords : Implementation, Community, Village SDGs

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah besar dan kompleks yang ditimbulkan oleh kondisi dan interaksi budaya, sosial, politik, dan ekonomi (Gunamantha dan Susila., 2015). Kemiskinan bukan menjadi masalah baru, tetapi sudah ada sejak masa penjajahan hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang belum teratasi. Salah satu negara berkembang, seperti Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah utama yang harus diperhatikan dan segera diminimalisir. Upaya penganggulangan kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberdaakan masyarakat pedesaan (Daraba, 2017). Berbagai agenda pembangunan diharapkan dapat lebih memfokuskan untuk target-target penanggulangan kemiskinan, sehingga percepatan pencapaian target pengurangan kemiskinan dapat diwujudkan. Strategi dan program penanggulangan kemiskinan perlu pendekatan yang terpadu, implementasinya dilakukan secara bertahap, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan semua pihak.

Partisipasi masyarakat menjadi poin penting dalam keberhasilan program karena sangat ditentukan tingkat partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan karena sbagai objek dan subjek dari pembangunan tersebut. Program pemerintah yang masuk ke desa diharapkan jangan sampai program tersebut hanya menyisakan ketergantungan secara terus-menerus tanpa melahirkan kemandirian, hal tersebut dapat berpengaruh pada hilangnya keswadayaan dan kesukarelaan dari anggota masyarakat. (Ramadhan dan Buchari, 2014) menyebutkan bahwa actor yang terlibat dalam proses sumber daya organisasi dalam masyarakat lokal yang memiliki kepedulian. (Sumaryadi, 2005) menjelaskan bahwa ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat miskin yang selama ini tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan masyarakat lain yang non miskin.

(Lubis dan Aisyah., 2019) menjelaskan bahwa SDGs dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan. Dalam dokumen bertajuk “*Transforming Our World: The 2030 for Sustainable Development*”, seluruh negara dan *stakeholder* bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengakhiri kemiskinan, menciptakan bumi yang lebih aman bagi

semua umat manusia, dan segera menentukan langkah yang pasti untuk pembangunan berkelanjutan demi terjaminnya kualitas hidup generasi yang akan datang. SDGs saat ini telah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional, kemudian banyak daerah, khususnya pada tingkat provinsi dan beberapa pada tingkat kabupaten/kota, telah menindaklanjutinya dengan melakukan integrasi SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah. Pasca implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai pencapaian tujuan SDGs atau tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dapat diharapkan tujuan SDGs akan tercapai. Oleh karena itu, pengarusutamaan pembangunan desa dalam mendukung pencapaian SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat penting dan mendesak untuk dilakukan (Iskandar, 2020).

Pemerintah Desa memiliki hak untuk mengelola potensi desanya yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat desa setempat. Prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sutrisna IW, 2021). *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki dua konsep kunci yaitu kebutuhan, dimana sadar akan adanya kebutuhan hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin, serta keterbatasan dimana adanya keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. SDGs/TPB berawal dari keprihatinan mengenai persoalan pembangunan yang sampai saat ini belum tercapai secara penuh yaitu kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama berarti kesejahteraan objektif, yang menjelaskan suatu kondisi kesejahteraan yang dimiliki, dirasakan, serta dinikmati oleh semua penduduk di semua tingkatan (Santoso, 2019).

SDGs merupakan rencana pembangunan untuk semua negara anggota PBB, serta rencana perubahan sosial berskala besar, yang bukan hanya soal pergeseran konsumsi dan produksi, tetapi juga perombakan kelembagaan publik/pemerintah berkaitan pengentasan kemiskinan, partisipasi perempuan, penegasan atas larangan diskriminasi, penghentian kekerasan, anti korupsi, pelestarian hutan, peraturan tata guna lahan, pengendalian perubahan iklim, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan gambaran implementasi program SDGs Desa di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, dan mengidentifikasi dampak implementasi program SDGs Desa di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dasar penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan menekankan catatan deskripsi yang lengkap dengan menggambarkan situasi yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data. Penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri karena merupakan salah satu desa pelaksana program SDGs Desa dengan kriteria daerah rawan kekeringan. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Validitas data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu sebuah program pembangunan berkelanjutan yang terdapat 17 tujuan di dalamnya 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang di tentukan. Program ini merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000-2015 (Umam, 2018). Pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa fokus terhadap tujuan pertama, yaitu desa mampu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global, dimana suatu keadaan terjadi dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Berikut beberapa program SDGs Desa yang dilaksanakan di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri:

Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)

Salah satu tantangan khususnya bagi sebagian besar masyarakat yang kurang mampu, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hunian yang layak. (Khoirunnisa, dan Salomo., 2019) menjelaskan bahwa program RTLH ini adalah pengharapan terciptanya kondisi masyarakat yang mampu mengubah perilaku hidup sehat, sadar akan lingkungan yang bersih dan sehat,

sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan. Rumah layak huni sebagai salah satu representasi kebutuhan paling dasar manusia karena berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan, kesejahteraan, sikap sosial, dan produktivitas ekonomi. Tujuan dari program SDGs Desa mengenai bantuan RTLH ini untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, aman, serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan. Sasaran dalam program ini yaitu masyarakat yang memiliki rumah sesuai kriteria tidak layak huni, dan tergolong dibawah garis kemiskinan serta berpenghasilan rendah. Program RTLH mewajibkan bahwa tanah harus milik pribadi, bukan tanah yang menumpang atau tanah sengketa. Rumah tidak layak huni memiliki beberapa kriteria seperti:

Kondisi Rumah

Luas lantai rumah kurang dari 10 m². Dinding maupun atap terbuat dari bahan yang mudah rusak, seperti: papan, bambu atau seng. Lantai dari tanah atau semen dalam kondisi rusak dan rumah lembab. Rumah tidak memiliki ventilasi udara dan pembagian ruangan. Rumah tidak teraliri listrik. Rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, jamban. Kondisi Lingkungan. Lingkungan rumah kumuh dan becek. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar.

Pelaksanaan rehabilitasi RTLH diawali dengan dengan mekanisme pencarian bantuan secara administratif diserahkan kepada RT, RW kemudian tim SDGs Desa menerima penerima bantuan perbaikan atau pembangunan rumah tidak layak huni. Pemerintah Desa melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi melakukan pembangunan RTLH serta melaporkan pelaksanaan kegiatan RTLH. Implementasi pembiayaan rehabilitas RLTH yang diserahkan kepada masyarakat yang menerima itu langsung dibelikan bahan material bangunan. Anggaran yang diberikan berbeda-beda sesuai dari berbagai pihak bantuan, seperti: Provinsi 12 juta, Kabupaten 15 juta, dan Desa 15 juta. Program RTLH bersifat stimulan, sebab ada swadaya dari masyarakat sekitar maupun penerima bantuan itu sendiri. Apabila penerima bantuan kekurangan dalam mencukupi dana yang diberikan oleh pemerintah, maka tidak ada swadaya sama sekali sehingga rumah

akan dibangun dengan seadanya dan secukupnya dari dana bantuan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam semangat gotong royong sangat diperlukan dalam program RTLH.

Bantuan Benih

Masyarakat Desa Johunut sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pemerintah memiliki posisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi desa, termasuk memberikan perhatian dan penyediaan fasilitas dan bantuan kepada kelompok tani. Tujuan adanya bantuan benih diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha tani yang sangat menyangkut dengan tingkat kesejahteraannya, sehingga mampu mengurangi kemiskinan disektor pertanian. Pemberian bantuan yang diberikan kepada para petani berupa: benih padi, dan benih jagung. Benih padi yang diberikan yaitu Varietas Ciherang, Situbagendit, dan Situpatenggang, di mana varietas tersebut kurang cocok ditanam pada tanah di daerah Desa Johunut. Hal tersebut berpengaruh pada hasil tani yang kurang optimal. Benih jagung yang diberikan yaitu varietas jagung bisi dua, Jagung Asia, Jagung NK. Implementasi pemberian bantuan yaitu masyarakat mengambil di rumah kepala dusun masing-masing dalam kurun waktu 1 kali per tahun. Salah satu hambatan dalam bantuan benih yaitu pengadaan pemberian benih kurang tepat waktu, seperti: setelah panen. Sedangkan di Desa Johunut merupakan daerah rawan kering dan hanya memiliki 1x musim tanam dalam satu tahun, sehingga benih yang didapatkan tidak bisa langsung ditanam.

Dampak Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

Adapun implikasi atau dampak yang dirasakan secara langsung terhadap masyarakat atas persepsi terhadap pelaksanaan program SDGs Desa yang dilihat dari segi ekonomi dan segi sosial, di antaranya (1) Pengetahuan mengenai program SDGs Desa memiliki pengaruh besar dalam membentuk suatu perbedaan persepsi masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi baik dikalangan masyarakat menengah maupun ke atas. Sehingga dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam antusias melaksanakan program SDGs Desa. (2) Masyarakat Desa Johunut dalam memilih media informasi yang sering diakses yaitu media elektronik diantaranya televisi dan internet. Namun untuk media yang jarang diakses pun tidak menutup kemungkinan untuk tetap disosialisasikan, seperti: media cetak majalah, brosur, leaflet, dan spanduk. Hal tersebut memudahkan masyarakat mengetahui dan mempercepat realisasi Program SDGs Desa. (3)

Kondisi daerah yang susah sinyal karena hanya beberapa warga saja yang dapat mengakses wifi, dan jarak antar dusun tidak terlalu dekat bukan menjadi penghalang untuk masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa, seperti: sosialisasi SDGs Desa di Kantor Desa Johunut. Hal tersebut dapat dinilai bahwa masyarakat Desa Johunut masih turut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa. (4) Kegiatan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat diperlukan juga dalam bentuk sosialisasi secara langsung seperti seminar, atau FGD yang mana masyarakat dapat berkumpul bersama untuk mendapatkan informasi mengenai SDGs Desa dan program lainnya. (5) Dari pertahanan fisik, khususnya untuk penerima manfaat RTLH harus siap menerima tanggungan tambahan biaya pribadi jika diperlukan. Sebab bentuk bantuan bukan uang yang dapat dialokasikan untuk keperluan lain, melainkan dalam bentuk bahan material yang sudah disediakan dalam toko bangunan. Tanggungan pribadi penerima manfaat RTLH meliputi: konsumsi untuk tenaga kerja rehabilitasi rumah, dan biaya bahan material tambahan jika subsidi bantuan program kurang bisa mencukupi. Apabila proses rehabilitasi rumah sudah selesai, namun terdapat sisa material maka bahan tersebut dapat diambil dari toko bangunan, karena penerimaan bantuan tidak dapat diubah dalam bentuk uang. (6) Dari segi ekonomi, ketahanan kondisi dinamik kehidupan dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari luar dalam dan yang langsung atau tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup. Ketahanan ekonomi merupakan kapasitas untuk mengurangi kerugian ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berjalannya kegiatan. Ketahanan ekonomi dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghadapi program SDGs Desa sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat. Ketahanan ekonomi terdiri dari jenis pekerjaan masyarakat, pendapatan masyarakat, jumlah tabungan untuk perbaikan rumah dan bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat. Jenis pekerjaan masyarakat yang rentan berhubungan dengan jumlah pendapatan masyarakat yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan program SDGs Desa. (7) Dari segi sosial, untuk para penerima manfaat RTLH dalam merehabilitasi rumah tidak menggunakan upah untuk diberikan kepada tenaga kerja. Tenaga kerja rehabilitasi rumah yaitu tetangga-tetangga yang turut membantu dengan gotong-royong bersama. Hal tersebut sudah menjadi tradisi untuk Desa Johunut, sehingga dapat meningkatkan rasa toleransi, rukun antar warga dan hubungan interaksi sosial semakin membaik. Upaya ini sebenarnya memberikan dampak nyata dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat mengenai SDGs Desa. (8) SDGs Desa dapat meningkatkan ketahanan sosial yang meliputi empat dimensi diantaranya yaitu: melindungi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dari perubahan sosial yang akan mempengaruhi dalam arus global yang berkembang. Masyarakat Desa Johunut dengan keterbatasan sinyal, dan rawan kekeringan tidak mengurangi semangat masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan program SDGs Desa.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu program SDGs Desa yang terlaksana di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri yaitu bantuan RTLH dan bantuan benih. Proses implementasi program SDGs Desa dari tahap sosialisasi, perekrutan hingga kegiatan pelaksanaan oleh masyarakat Desa Johunut berjalan baik. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri berdampak positif terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin. Program RTLH bersifat stimulan, dalam implementasi kegiatan tetap harus ada swadaya dari masyarakat sekitar ataupun dari penerima bantuan itu sendiri, sebab dana yang diberikan tidak seberapa. Oleh sebab itu, apabila penerima bantuan tidak ada swadaya sama sekali maka rumah akan dibangun dengan seadanya dan secukupnya dari dana bantuan tersebut. Termasuk jika masyarakat sekitar pun tidak ikut serta membantu masyarakat yang menerima bantuan, maka dana tersebut digunakan semaksimal mungkin agar bangunan tetap terbangun dengan kokoh. Aturan dalam program RTLH ini menganjurkan untuk dilakukan gotong royong, hal tersebut berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam semangat gotong royong di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri memiliki antusiasme yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Daraba, D. (2017). Pengaruh program dana desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. *J Sosiohumaniora*, 19(1), 52–58.
- Gunamantha, IM. GPAJ, S. (2015). Analisis Dampak Program Pengembangan Kecamatan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng. *J Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 523–533.
- Iskandar, A. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis I., N Aisyah., A. K. M. (2019). *Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan*

dan Pemukiman Berbasis Hasil (Outcome). BAPPENAS.

- Ramadhan P dan Buchari, A. (2014). Model Kelembagaan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kawasan Kaki Gunung Manglayang. *J Sosiohumaniora*, 16(2), 165–170.
- Santoso, D. (2019). *Administrasi Publik Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Citra Utama.
- Sutrisna IW. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *J Cakrawarti*, 4(1), 1–10.
- Umam, K. (2018). Smart Kandang Ayam Petelur Berbasis Internet Of Things Untuk Mendukung SDGs 2030 (Sustainable Development Goals). *J TEKNOINFO*, 12(2), 43–48.